



Indonesian Journal of Islamic Religious Education (INJIRE)

Journal homepage: <https://injire.org/index.php/journal>

e-mail: injireadpisi@gmail.com

Dinamika hegemoni kuasa pada pendidikan Islam di Indonesia

Author:

Ahmad Baedowi

Affiliation:

Universitas Indonesia,
Indonesia

Corresponding author:

Ahmad Baedowi,
abaedowi40@gmail.com

Dates:

Received 10 April 2023

Revised 18 May 2023

Accepted 23 June 2023

Available online 30 June 2023

**Abstract**

In history, power is something that is needed and able to influence human life. On the other hand, power sometimes uses various methods, both aggressive, agitative and subtle, in order to perpetuate the dominance and hegemony of its power. Likewise with the world of education. It cannot be separated from power. In fact, educational practices in Indonesia are still characterized by the hegemony of power, this is proven by the dichotomy and dualism of religious education and general education. This article tries to reveal the phenomenon of inequality and discrimination in education, especially religious education in Indonesia from an institutional perspective, using Antonio Gramsci's power hegemony approach. By using library research methods, this research shows that there are problems related to the dichotomy and dualism of religious education and general education, namely the tendency for the government to pay attention to general education and ignore religious education.

Keywords: Power Hegemony; Educational Dualism; Islamic Education Dichotomy; General Education

Abstrak

Kekuasaan dalam sejarahnya merupakan hal yang dibutuhkan dan mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Di sisi lain kekuasaan terkadang menggunakan berbagai macam cara baik agresif, agitatif maupun halus dalam rangka melanggengkan dominasi dan hegemoni kuasanya. Begitu juga dengan dunia pendidikan tidak bisa terlepas dari kekuasaan. Faktanya praktik pendidikan di Indonesia masih diwarnai dengan adanya hegemoni kuasa, hal ini dibuktikan dengan adanya dikotomi dan dualisme pendidikan agama dengan pendidikan umum. Tulisan ini mencoba mengungkap fenomena adanya ketimpangan dan diskriminasi pendidikan khususnya pendidikan agama di Indonesia dari sudut pandang kelembagaan, dengan menggunakan pendekatan hegemoni kuasa Antonio Gramsci. Dengan menggunakan metode kepustakaan (library research), penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah terkait dengan dikotomi dan dualisme pendidikan Agama dan pendidikan umum yakni adanya kecenderungan perhatian pemerintah terhadap pendidikan umum dan mengabaikan pendidikan agama.

Kata Kunci: Hegemoni Kuasa; Dualisme Pendidikan; Dikotomi Pendidikan Islam; Pendidikan Umum.

Pendahuluan

Munculnya hegemoni pemisahan pendidikan di Indonesia disebabkan oleh kolonialisasi bangsa Barat yang menjajah Indonesia. Hal tersebut menyisakan problem yang belum selesai di antaranya adalah persoalan pendidikan. Kolonialisme merupakan penyebab adanya dikotomi pendidikan. Di negeri-negeri muslim, bangsa-bangsa penjajah pada umumnya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan menginisiasi sebuah sistem pendidikan baru di negeri jajahan masing-masing. Di sisi lain, sistem pendidikan asli milik penduduk pribumi secara sistematis dimusuhi dan dilemahkan, atau setidaknya diabaikan sama sekali. Kebijakan belah bambu tersebut pada gilirannya melahirkan sikap saling mencurigai dan kemudian saling memusuhi.

Dengan bergulirnya waktu, sistem pendidikan yang didukung oleh bangsa penjajah mengalami kemajuan pesat. Sebaliknya, sistem pendidikan Islam semakin terjepit dan tertinggal. Jurang antara dua sistem terus semakin menganga dalam. Di tengah masyarakat kemudian muncul stigma bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang tertinggal dan anti kemajuan; sementara itu pendidikan yang disediakan Barat adalah pendidikan yang maju, modern, dan menjanjikan. Maka perpecahan dan pertentangan tidak hanya menimpa sistem pendidikan, tetapi lebih serius lagi membelah masyarakat bangsa terjajah sampai ke dalam cara berpikirnya (Hasan Asari (ed) 2015; Khurshid Ahmad 1983).

Penjajahan kolonial Belanda memiliki motif dan tujuan yang sangat kompleks dengan mengusung tiga tema besar, yang sering disebut dengan 3G: Gold (emas), Glory (Kekuasaan), dan Gospel (Agama/Injil), yakni Ekonomi, politik dan agama. Ekonomi dan politik penjajah, menjadi unsur penting yang senantiasa dikaitkan dengan sistem pendidikan Belanda. Dalam hubungannya dengan kepentingan itu, maka para penyusun konsep pendidikan, agaknya tidak dapat melepaskan diri dari kondisi sosial ekonomi dan politik pemerintahan pusat Nederland, dan kaitannya dengan kepentingan politik Hindia Belanda. Dengan demikian setiap kebijakan yang dijalankan di bidang pendidikan cenderung berkaitan dengan kepentingan politik kolonial Belanda di Indonesia. Sehingga pendidikan Islam itu sendiri sulit untuk berkembang dan perkembangannya sangat dibatasi serta tidak diberi ruang secara bebas (S Nasution 2001).

Pemisahan pendidikan di Indonesia secara hierarki aturan adalah 1) Undang-Undang No. 4 tahun 1950 yang kemudian dikukuhkan kembali melalui Ketetapan MPRS No XXVII/MPRS/1966. 2) Sistem Pendidikan Nasional Pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 1975; 3) Sistem Pendidikan Nasional versi Undang-Undang No 2 Tahun 1989 (Basyit 2019).

Pengelolaan pendidikan di Indonesia dibagi menjadi dua pengelola, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan dari Kementerian Agama hanya untuk madrasah, sedangkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya untuk sekolah (Nurhayati 2009). Pendidikan formal mandiri merepresentasi pendidikan bagi masyarakat berkemampuan ekonomi, pendidikan elite, mahal, bermutu, dan menjadi tempat anak-anak yang memiliki kemampuan akademis tinggi. Sebaliknya, pendidikan formal standar merepresentasi pendidikan "biasa saja", tempat berkumpulnya anak-anak yang tidak memiliki kemampuan akademis, miskin, dan disubsidi pemerintah.

Dikotomi antara Ilmu "agama" dan ilmu "umum" telah melahirkan dualistis pada sistem pendidikan formal di Indonesia, yakni sekolah dan madrasah. Sekolah dipersepsi sebagai "institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan ilmu umum", yang diselenggarakan dan dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan madrasah dipersepsi sebagai "institusi yang menyelenggarakan pendidikan ilmu agama" yang diselenggarakan dan dikelola oleh Departemen Agama. Dari kedua sekolah ini, muncul persepsi bahwa sekolah-sekolah yang dikelola Diknas dipersepsikan sebagai sekolah "umum", non-agamis, atau "sekuler", tapi maju, terdepan, dan modern. Sedangkan, sekolah-sekolah yang dikelola Departemen Agama, dikesankan sebagai sekolah "agama" dan religius, tetapi tertinggal, tertutup bagi kemajuan ipteks, dan tradisional (Basyit 2019).

Dalam dunia pendidikan adanya pengaruh (relasi) dari penguasa merupakan warisan dari penjajahan yang mengakibatkan adanya pemisahan (dikotomi) pendidikan di Indonesia. Padahal dalam Islam tidak ada pemisahan ilmu pengetahuan. Semua pengetahuan berasal dari Allah. Apakah Ilmu agama maupun ilmu umum. Islam sendiri tidak mengklasifikasi ilmu pengetahuan untuk saling berlawanan satu sama lain, melainkan tetap mengaitkan ilmu satu dengan ilmu lain dan mendahulukan mana yang lebih dibutuhkan oleh pemilik ilmu dan masyarakat di sekitarnya. Para ulama dan pakar hukum Islam menjelaskan, ilmu yang lebih dulu dipelajari disebut ilmu yang *wajib 'ain* untuk dipelajari, sedang ilmu yang akan dipelajari selanjutnya adalah ilmu yang *wajib kifayah*, *sunnah* dan *mubah* dipelajari. Kewajiban mempelajari suatu ilmu pengetahuan didasarkan pada kebutuhan mendesak individu, kepentingan masyarakat dan Negara (Zarnuji n.d.). Belum lagi kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa Sekolah dengan berbagai macam aturan akademik, kurikulum, dan proses belajar-mengajar yang terjadi di dalam kelas, ternyata memiliki potensi untuk menciptakan dehumanisasi.

Dehumanisasi menurut Paulo Freire adalah keadaan kurang dari manusia atau tidak lagi menjadi manusia. Dehumanisasi dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi yang menempatkan manusia sebagai objek oleh manusia lainnya maupun oleh sistem. Di dalam kurikulum pendidikan yang selama ini ditentukan oleh pemegang kebijakan dan kemudian ditasbihkan oleh guru atau dosen sebagai subjek di dalam kelas, ternyata hanya menempatkan peserta didik sebagai objek pendidikan (Qomaruddin 1970).

Melihat kondisi pendidikan yang demikian itu karena memang pendidikan di satu sisi memiliki hubungan yang sangat erat dengan prosesi politik suatu Negara. Ketika pemerintahan cenderung korup dan ingin memapankan kekuasaan, maka pendidikan dijadikan sebagai alat untuk melakukan indoktrinasi dan *penginjeksian* dogma-dogma agar rakyat patuh terhadap Negara. Selain itu, tradisi pendidikan lebih-lebih di Indonesia tidak diarahkan untuk mengenali kondisi realitas masyarakat secara mondial. Dengan kata lain bahwa pendidikan tidak berhubungan dengan dunia politik dan sosial kemasyarakatan. Para pemuda, pelajar dan mahasiswa tidak perlu mencampuri urusan politik apalagi politik praktis cukuplah mereka giat belajar dan mencari pekerjaan setelah mendapatkan gelar keserjanaan. Pola seperti ini pernah dipraktikkan oleh rezim orde baru dengan menerapkan peraturan akademik Normalisasi Kegiatan Kampus/Badan Koordinasi Kampus NKK/BKK (Qomaruddin 1970).

Fakta di lapangan pendidikan di Indonesia dari zaman sebelum kemerdekaan sampai hari ini tetap menyuguhkan adanya pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Yang pada ujungnya pada pendiskriminasian dari salah satu sistem, yakni pendidikan agama yang terdiskriminasi. Pada beberapa kasus misalnya adanya pemisahan pengelolaan, perbedaan perhatian dan pengelolaan sehingga di lapangan pendidikan agama seperti 'dibiarkan' jalan sendiri. Berbeda dengan pendidikan umum yang mendapatkan perhatian lebih dengan dukungan anggaran yang luar biasa.

Adanya diskriminasi pendidikan agama di Indonesia terlihat di antaranya dari lulusan perguruan tinggi agama tidak diterima dengan baik pada perguruan tinggi umum. Bahkan alumni dari Perguruan Tinggi berbasis agama tidak diberikan slot 'mengajar' atau berkontribusi di perguruan tinggi umum dikarenakan berbagai macam alasan seperti dianggap kurang kompeten sampai diduga lulusan pendidikan agama atau khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) sudah terinfiltrasi paham liberal. Hal ini merupakan fenomena yang sangat menyayat hati. Di mana pendidikan agama di Indonesia dikelola oleh Kementerian Agama yang sejak pendiriannya sudah fokus untuk mengurus masalah agama dan keagamaan termasuk pendidikan agama. Dari sini kita tahu ada problem serius dalam pendidikan kita di mana adanya pendikotomian dan *gap* yang sangat lebar antara pendidikan agama dan pendidikan umum, sehingga masih adanya diskriminasi terutama dari lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) yang dianggap sebelah mata.

Permasalahan yang perlu dikaji adalah bagaimana hegemoni kuasa dalam hal ini Pendidikan Umum terhadap pendidikan Islam Indonesia itu masih sedemikian kuat sehingga *output* dari

lembaga pendidikan Islam masih di pandang sebelah mata? harus ada reformasi sistem pendidikan yang stabil dan berkeadilan yang mampu menjembatani adanya dua sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia yakni pendidikan umum dan pendidikan agama. Hal ini agar adanya sistem liberal atau liberalisasi yang diterapkan dalam pendidikan bisa benar-benar memberikan manfaat bagi segenap warga Indonesia. Sehingga kesempatan pendidikan tinggi bisa dikenyam oleh segenap rakyat Indonesia dari berbagai kalangan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), di mana peneliti akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kepustakaan data kebijakan-kebijakan seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan pemangku kepentingan serta penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti diketahui bahwa Antonio Gramsci melihat penguasaan Negara melalui “hegemoni” yakni pendudukan melalui ide, nilai, pemikiran dan sebagainya, pendidikan tidak hanya tempat di mana keterampilan teknis diajarkan, tetapi juga tempat di mana nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan dunia ditanamkan pada generasi muda (Anshori Isa 2009). Praktik hegemoni ini yang kemudian diterapkan penguasa dalam dunia pendidikan dengan membagi pendidikan Agama dan pendidikan Umum.

Peneliti mengolah data dari sumber-sumber dan menarik kepada sebuah kesimpulan besar (Khatibah 2011). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif di mana peneliti memaparkan berdasarkan teori hegemoni kuasa Antonio Gramsci dalam sistem pendidikan di Indonesia yang dibedakan dua lembaga yakni Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama. Kemudian peneliti menganalisis dengan pemikiran dari Antonio Gramsci tentang hegemoni kuasa khususnya hegemoni dalam bidang pendidikan. Setelah itu penulis berusaha membuat analisis sintesis dalam kaitannya dengan hegemoni dualisme dan dikotomi pendidikan Agama dan Pendidikan Umum.

Hasil

Melanggengkan kekuasaan

Pramoedya Ananta Toer salah seorang sastrawan Indonesia menyebutkan dalam *quotes* masyhurnya “bekerja untuk keabadian” dapat dimaknai sebagai titik tolak manusia menciptakan hegemoni kekuasaan yang sedang berlangsung melalui dialektika antar civitas organisasi. Hal itu pula terdapat dalam pandangan Gramsci tentang hegemoni. Ia hadir secara halus dalam pengetahuan, produksi pengetahuan, perekrutan aparatur maupun melalui doktrin dan intervensi.

Hal tersebut di atas yang menjadi satu kajian penting di mana pendidikan yang seharusnya bebas, demokratis sebagaimana ditawarkan dalam Islam ternyata tidak memenuhi tujuan yang diharapkan. Banyak praktik-praktik pendidikan yang tidak berpihak pada yang lemah, bahkan cenderung menguasai dan mendikte apa yang menjadi tujuan pihak penguasa. Untuk menyikapi beberapa persoalan pendidikan belakang ini gagasan Antonio Gramsci tentang hegemoni mungkin bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian.

Antonio Gramsci dan gagasannya mengenai hegemoni memberikan gambaran sebuah bentuk strategi perubahan sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain, hegemoni merupakan sebuah upaya memahami seluk beluk kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk merubahnya, sesuai dengan keinginan kelompok yang menghegemoninya. Melalui pemikirannya, Antonio Gramsci berusaha untuk memahami masyarakat dengan tujuan untuk menanamkan nilai dan ideologi yang dikehendaki guna merubah dan membentuk pola kehidupan dan kesadaran mereka. Perubahan tersebut kadang nyaris tak pernah disadari oleh kelompok yang dihegemoni (Qomaruddin 1970).

Teori hegemoni kuasa Gramsci dapat digunakan untuk membantu menganalisis pengaruh kuasa dan pendidikan Islam di Indonesia dalam menjawab tantangan dalam mencapai pendidikan yang inklusif dan beragam. Ada beberapa aspek yang perlu dikritisi dalam pendidikan Islam di Indonesia yakni dominasi pemikiran dan kurikulum oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan kekuasaan atau kelompok-kelompok tertentu. Dalam pendidikan di Indonesia, kurikulum dan

pemikiran yang diajarkan sering kali mencerminkan kepentingan dan pandangan kelompok dominan dalam hal ini pemerintah, sementara suara dan perspektif yang berbeda diabaikan atau dihilangkan. Hal ini dapat menciptakan hegemoni kekuasaan yang membatasi kebebasan berpikir dan merampas hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif dan beragam.

Gramsci menekankan pentingnya perubahan budaya melalui praktik pendidikan yang kritis dan transformatif. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, praktik pendidikan yang kritis dapat mendorong masyarakat untuk berpikir secara mandiri, menganalisis berbagai sudut pandang, dan mengembangkan pemahaman yang inklusif dan beragam tentang agama. Pendidikan Islam yang kritis juga harus mempromosikan nilai-nilai universal seperti toleransi, persamaan, dan penghargaan terhadap perbedaan (Budiardjo 2016).

Dalam praktik dunia pendidikan, hegemoni lebih menekankan pada bentuk ekspresi, cara penerapan, mekanisme yang dijalankan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui kepatuhan para peserta didik sehingga upaya tersebut dapat berhasil mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka. Dalam hal ini, hegemoni merupakan kondisi sosial dalam semua aspek kenyataan sosial yang didominasi atau disokong oleh kelas pendidik, hal yang demikian ini telah terkonstruksi dengan sendirinya pada ruang kesadaran dan pengetahuan para peserta didik sebagai kelas yang dihegemoni. Dititik ini hegemoni tampak menjadi suatu organisasi konsensus yang standar keberhasilannya ditentukan oleh kesepakatan yang diciptakan, ataupun hasil yang diperoleh (H.A.R 2003).

Praktik hegemoni dapat dijumpai pada perguruan tinggi atau kampus. Catatan McDonald & Coleman, dalam ranah pendidikan, kelompok elit dapat memproduksi, menghasilkan serta mempromosikan ideologi yang menguatkan posisi mereka sebagai pembuat kebijakan sehingga mereka menaruh kepercayaan pada institusi. Dalam institusi kampus terdapat struktur pimpinan (Rektor) sebagai pengambil kebijakan yang berarti ada kekuasaan. Kekuasaan tersebut didapatkan melalui kontestasi politik kampus. Adanya perawatan dan upaya pelanggaran politik kampus ini bertahan sampai saat ini.

Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan bersama adalah bagaimana hegemoni dapat dilanggengkan oleh individu atau institusi? Upaya yang dilakukan oleh kelompok dominan dalam hal ini rektor dalam menghegemoni kekuasaan adalah dengan mengeluarkan kebijakan penanaman ideologi melalui perekrutan kemudian menjalankan kaderisasi. Setelah dikader, mereka dipersiapkan untuk kembali mengikuti kontestasi dalam politik kampus. Menduduki pucuk pimpinan dalam institusi. Sebaliknya jika penguasa tidak dapat melakukan hegemoni melalui struktur yang telah disebutkan di atas maka hegemoni kekuasaan tidak akan langgeng.

Desentralisasi dan privatisasi Pendidikan Tinggi

Menguatnya hegemoni kuasa dalam bidang pendidikan disebabkan oleh adanya deregulasi dan desentralisasi pendidikan. Menurut Dave Hill dalam Galih R.N. Putra menjelaskan bahwa kebijakan desentralisasi adalah upaya memperkecil tanggung jawab pemerintah pusat agar pemerintah daerah/ regional, dan sektor privat terlibat atau bertanggung jawab dalam pendidikan. Sedangkan desentralisasi di dalam pendidikan menurut Joseph Zajda ialah hal yang terkait dengan pembuatan dan pengambilan kebijakan, distribusi kekuasaan, maupun pendanaan. Secara garis besar, dampak dari desentralisasi di dalam pendidikan adalah meningkatnya otonomi serta kekuasaan lembaga pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan, dan keleluasaan dalam mencari pendanaan.

Sedangkan privatisasi pendidikan menurut Henry M. Levin di dalam penelitiannya untuk UNESCO adalah lembaga pendidikan yang bukan dikelola oleh pemerintah, baik dengan tujuan profit atau non-profit. Privatisasi semisal payung yang meliputi berbagai kebijakan dan program pendidikan seperti transfer aktivitas, aset dan tanggung jawab dari pemerintah atau institusi publik kepada sektor privat individual dari berbagai agensi. Secara garis besar privatisasi pendidikan terjadi pada tiga bentuk seperti: meningkatnya lembaga pendidikan yang disediakan oleh sektor swasta;

pendanaan pendidikan mayoritas ditanggung oleh sektor swasta (masyarakat dan sumbangan) dibanding dari pemerintah (APBN).

Desentralisasi dan privatisasi pendidikan membuat peran dan pengaruh perguruan tinggi semakin menguat dibandingkan dengan peran pemerintah. Untuk menjaga tujuan mulia pendidikan yakni keadilan dan kesetaraan pemerintah harus berupaya membuat regulasi terkait hal tersebut. Desentralisasi dan privatisasi masih dominan dalam perguruan tinggi umum dan belum menyentuh rata kepada perguruan tinggi agama. Kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh perguruan tinggi umum kemudian dijadikan alat untuk menghegemoni pengaruh dan kebijakan dalam kampus. Termasuk di dalamnya belum luasnya kesempatan lulusan perguruan tinggi agama untuk berkontribusi dalam perguruan tinggi umum.

Dualisme dan dikotomi Pendidikan Islam Indonesia

Adanya dualisme dan dikotomi dalam dunia pendidikan merupakan hal yang sudah lumrah kita jumpai. Padahal dalam Islam ilmu pengetahuan dan Al-Qur'an merupakan satu totalitas dan integritas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia diberikan potensi oleh Allah berupa akal pikiran untuk mengkaji dan menganalisis apa saja yang terjadi di alam jagat raya ini sebagai pembelajaran untuk manusia sendiri. Penggunaan akal ini pada dasarnya adalah untuk memperteguh hati nurani dalam dada manusia dalam meyakini kebenaran yang disampaikan oleh Al-Qur'an bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Dalam konteks pendidikan, adanya pemahaman dualisme yang juga dikaitkan dengan dikotomi diartikan sebagai pemisahan antara pendidikan umum dari pendidikan agama. Akan tetapi sebenarnya dalam tataran prinsip ada yang membedakannya, jika dikotomi itu berkaitan dengan isi atau konten materi, sedangkan dualisme lebih kepada sistem pengelolaannya. Pandangan dikotomi selalu melahirkan perbedaan di satu sisi dan penyamaan di sisi yang lain.

Dalam dikursus pendidikan Islam di Indonesia ada banyak masalah yang muncul di antaranya adalah adanya diskriminasi terhadap pendidikan Islam. Jika dilacak adanya diskriminasi tersebut berasal dari kepentingan politik Belanda untuk melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Belanda memisahkan antara politik dan agama. Bahwa pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dipisahkan dari muatan-muatan agama. Sedangkan pendidikan agama diserahkan kepada pesantren-pesantren atau lembaga pendidikan non pemerintah (Karel n.d.). Hal ini yang kemudian membangun *maindset* masyarakat Indonesia untuk membedakan pendidikan.

Dalam perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, ada intervensi dari pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam, misalnya Gubernur Jenderal Van Der Capellen pada tahun 1819 menginstruksikan kepada para residen agar menyelidiki kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki pendidikan pribumi. Verkerk Pistorius juga pernah mengusulkan supaya perkembangan pendidikan dilakukan dengan memperbaiki secara bertahap sistem pendidikan asli yang sudah ada. Meskipun ada beberapa usulan tersebut di atas untuk memperbaiki pendidikan pribumi ternyata pemerintah Belanda tetap memilih jalan untuk mengembangkan sistem pendidikan sendiri, meskipun sebenarnya menurut Steenbrink ada beberapa pendapat memberikan penilaian positif terhadap sistem pendidikan asli Indonesia dalam perkembangan pendidikan modern (Karel 1984).

Adanya dualisme dalam dunia pendidikan menimbulkan dampak negatif seperti misalnya krisis nilai, yang pada ujungnya kepada moral dan peradaban. Manusia akan menganggap bahwa ilmu itu bebas nilai. Sedangkan dampak dari dualisme pendidikan secara spesifik adalah terpuruknya salah satu pendidikan karena kurangnya perhatian dalam hal ini lembaga pendidikan Islam yang tidak menekankan penguasaan ilmu empirik, walaupun secara moralitas dapat mempertahankan sistem nilai dan disiplin ilmu-ilmu klasik. Sedangkan lembaga pendidikan umum yang menekankan pengetahuan empirik sangat rapuh dalam pengetahuan agama. Selain itu dari aspek kelembagaan adanya dualisme dan dikotomi dalam lembaga pendidikan menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar lembaga.

Diskusi

Hegemoni kuasa pendidikan: kritik diskriminasi Pendidikan Islam Indonesia

Jika kita menelisik konsep pendidikan Islam, maka kita tidak akan menemui adanya pemisahan dan perbedaan. Islam memandang pendidikan sebagai suatu yang setara, sederajat dan juga tidak ada diskriminasi. Dalam sejarah pendidikan Islam, tidak terdapat apa yang dinamakan sistem kelas masyarakat dalam pelajaran, tidak ada sekolah-sekolah dengan bayaran untuk orang-orang kaya, pendidikan gratis tanpa bayar bagi anak-anak orang yang berkekurangan, kecuali di zaman penjajahan. Kaum penjajah memasukkan sistem kelas-kelas masyarakat ke dalam alam pendidikan dan mengadakan perbedaan-perbedaan antara anak orang-orang kaya dan berada dengan anak orang-orang miskin/kurang punya dengan jalan mendirikan sekolah-sekolah rendah, menengah dan tinggi dengan bayaran buat anak si kaya, sekolah rendah secara gratis buat anak si miskin (al-Abrasyi n.d.).

Dalam konsep pendidikan Islam terdapat prinsip-prinsip esensial seperti persamaan, kesetaraan, dan kebebasan. Serta kesempatan yang sama untuk belajar, tanpa diskriminasi. Karena Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah perintah agama yang harus dijalankan bagi setiap individu muslim dengan tujuan menggapai Ridha Allah bukan hanya melulu tentang materi keduniawian. Memang dalam praktiknya di lapangan, pendidikan di satu sisi memiliki hubungan yang sangat erat dengan prosesi politik suatu negara. Ketika pemerintahan cenderung korup dan ingin memapankan kekuasaan, maka salah satu caranya adalah pendidikan yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan indoktrinasi dan *penginjeksian* dogma-dogma agar rakyat patuh terhadap negara. Selain itu, tradisi pendidikan khususnya di Indonesia tidak diarahkan untuk mengenali kondisi realitas masyarakat secara universal. artinya bahwa pendidikan tidak berhubungan dengan dunia politik dan sosial kemasyarakatan (al-Abrasyi n.d.).

Persoalan di atas merupakan salah satu kajian penting di mana pendidikan yang seharusnya bebas, tidak diskriminatif dan setara sebagaimana ditawarkan dalam Islam justru tidak memenuhi tujuan yang diharapkan. Banyak praktik-praktik pendidikan yang tidak berpihak pada yang lemah, bahkan cenderung menguasai dan mendikte apa yang menjadi tujuan pihak penguasa. Hal ini seperti digambarkan dalam pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni. Dalam pandangan Gramsci, perubahan sosial bukanlah semata-mata upaya menyangkut masalah kekuatan ekonomi dan fisik, tapi juga melibatkan perebutan wilayah kebudayaan dan ideologi: suatu upaya masyarakat bawah untuk membebaskan diri mereka dari budaya kaum borjuis dan untuk membangun nilai budaya mereka sendiri bersama-sama dengan kaum tertindas dan lapisan intelektual yang berpihak (Gramsci 1978). Dalam konteks hegemoni pendidikan hal ini terjadi ketika adanya upaya untuk mempertahankan keadaan dalam hal ini mempertahankan ideologi atau pemahaman tentang agama dan keagamaan. Dalam dinamika perguruan tinggi, kebijakan rektor dengan tidak menerima lulusan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan alasan kurang kompeten dan juga terindikasi radikal merupakan bagian dari cara untuk mempertahankan (hegemoni) pemahaman yang sudah ada dalam instansi (kampus) tersebut.

Melalui konsep hegemoni, Gramsci berargumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. Pertama, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa *law enforcement*. Perangkat kerja yang pertama ini biasanya dilakukan oleh pranata negara (*state*) melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi dan bahkan penjara. Kedua, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa misalkan melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan juga keluarga (Gramsci 2013).

Dalam konteks pendidikan, hegemoni lebih menekankan pada bentuk ekspresi, cara penerapan, mekanisme yang dijalankan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri dan institusi melalui kepatuhan para civitas yang ada sehingga upaya tersebut dapat berhasil mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka. Dalam hal ini, hegemoni merupakan kondisi

sosial dalam semua aspek kenyataan sosial yang didominasi atau disokong oleh kelas pendidik atau bisa jadi pimpinan.

Hegemoni tampak menjadi suatu organisasi konsensus yang standar keberhasilannya ditentukan oleh kesepakatan yang diciptakan, ataupun hasil yang diperoleh. Hal yang demikian ini dapat terlihat dari kesepakatan antara pimpinan dan yang dipimpin melalui proses belajar. Dengan demikian dalam pandangan Antonio Gramsci hegemoni adalah hubungan edukasional (*educational relationship*) (Tilaar H.A.R. 2003).

Kosep hegemoni yang diuraikan Antonio Gramsci lebih mengutamakan proses yang bersifat saling pengertian dan mendukung baik dari pihak yang mendominasi (kelas dominan penguasa), kepada pihak yang didominasi, tidak dengan kekerasan bahkan lebih pada bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai masyarakat dominan dilakukan dengan penguasaan basis-basis pikiran, kemampuan kritis, dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka yang ditentukan lewat birokrasi (masyarakat dominan). Namun dalam konteks diskriminasi pendidikan di Indonesia hegemoni kekuasaan tersebut digunakan untuk memotong peran pendidikan agama dalam hal ini lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk berkiprah pada Perguruan Tinggi Umum (PTU) dengan dalih dianggap kurang profesional dan terindoktrinasi paham liberal yang dikhawatirkan akan menghambat kemajuan dan merusak tatanan ideologi yang sudah ada pada instansi tersebut sehingga dari sisi kualitas dipandang sebelah mata bahkan oleh orang Indonesia sendiri yang kebetulan mereka tidak bersentuhan dengan pendidikan agama.

Kesimpulan

Adanya dikotomi dan dualisme pendidikan Islam di Indonesia muncul akibat adanya arus pemikiran hegemoni kuasa Barat yang kemudian mengubah pola dan struktur pendidikan dengan warna sekuler dan kurang memasukkan nilai-nilai keindonesiaan dalam kurikulumnya. Pemerintah atau penguasa melakukan praktik hegemoni dalam bidang pendidikan. Kebijakan pemisahan ini di kemudian hari memunculkan problem kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara pendidikan Agama yang digawangi oleh Kementerian Agama dan pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga pemisahan ini dapat menghambat pemahaman holistik tentang nilai-nilai dan etika yang dapat bersifat lintas agama. Dalam kasus lain, diskriminasi terhadap pendidikan Islam terlihat dari adanya aturan salah seorang rektor Perguruan Tinggi Umum yang tidak berkenan menerima *output* dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan alasan kurang kompeten dan juga terindikasi paham liberal merupakan bagian dari hegemoni kuasa yakni upaya mempertahankan apa yang sudah ada dalam institusi tersebut dan dianggap lebih baik dan kemudian menerapkannya dalam lembaga yang dipimpinnya. Hal tersebut merupakan citra buruk bagi pendidikan Islam di Indonesia karena masih terdiskriminasi dan juga dianggap sebelah mata.

Daftar Pustaka

- al-Abrasyi, M. Athiya. n.d. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Anshori Isa. 2009. "Negara, Ideologi Pendidikan dalam Pandangan Antonio Gramsci dan Louis Althusser." *Halaqa* 8(1):1.
- Basyit, A. 2019. "Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Tabdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*.
- Budiardjo, M. 2016. "Hegemoni Pendidikan dalam Gerakan Sosial (Analisis Pemikiran Antonio Gramsci)." *Humanus: Jurnal Sosial dan Humaniora* 1:55–56.
- Gramsci, Antonio. 1978. "Selections From Prison Notebooks (Eds. by Quintin Hoare and Geoffrey N. Smith)." Hal. 9 in. London: Lawrence and Wishart.
- Gramsci, Antonio. 2013. *Catatan-catatan dari Penjara*. Terj. Teguh Wahyu Utomo. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

H.A.R, Tilaar. 2003. *Kekuasaan & Pendidikan*. Magelang: Indonesiatera.

Hasan Asari (ed). 2015. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Memperkokoh Eksistensi, Memperluas Kontribusi*. Medan: IAIN Press.

Karel, Steenbrink A. 1984. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.

Karel, Steenbrink A. n.d. *Kawan dalam Pertikaian kaum kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942, Cet 1*. Bandung: Mizan.

Khatibah. 2011. "Penelitian Kepustakaan." *Iqra* 5(1):36–39.

Khurshid Ahmad. 1983. "The Nature of the Islamic Resurgence." in *Voices of Resurgent Islam*, John L. Esposito (ed.). New York: Oxford University Press.

Nurhayati, Djasas. 2009. *Dinamika pendidikan Islam di Indonesia pascakemerdekaan*. Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Qomaruddin. 1970. "Analisis Pemikiran Antonio Gramsci tentang Hegemoni Menurut Konsep Pendidikan Islam." 5–6.

S Nasution. 2001. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Bumi Aksara.

Tilaar H.A.R. 2003. *Kekuasaan & Pendidikan*. Magelang.

Zarnuji, Burhanudin. n.d. *Ta'limutalim*. Surabaya: al Hidayah, TT.

Anshori Isa. (2009). Negara, Ideologi Pendidikan dalam Pandangan Antonio Gramsci dan Louis Althusser. *Halaga*, 8(1), 1.

Basyit, A. (2019). Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Tabdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*.

Budiardjo, M. (2016). Hegemoni Pendidikan dalam Gerakan Sosial (Analisis Pemikiran Antonio Gramsci). *Humanus: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1, 55–56.

Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Iqra*, 5(1), 36–39.

Qomaruddin. (1970). *Analisis Pemikiran Antonio Gramsci tentang Hegemoni Menurut Konsep Pendidikan Islam*. 5–6.